

Dakwah Dan Politik Identitas:

Implikasi Kehidupan Keagamaan Dalam Dinamika Sosial-Politik Kontemporer

Sukirno

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

Email: sukirno@updn.ac.id

Abstract

This study examines the intersection of dakwah (Islamic preaching) and identity politics within the contemporary socio-political context of Indonesia. The research addresses the rising influence of identity politics based on religious affiliation and its impact on social cohesion and political behavior. By employing a mixed-methods approach that includes surveys and in-depth interviews with religious leaders, preachers, and community members, the study explores how dakwah functions both as a tool for political mobilization and as a potential mediator fostering social harmony. Key findings reveal that while dakwah is often co-opted to advance exclusive political agendas leading to increased polarization and social fragmentation, moderate dakwah practices promote inclusivity, tolerance, and conflict mitigation. The research highlights the strategic role of moderate dakwah in countering divisive identity politics, especially when integrated with digital media platforms, thus extending its outreach and dialogical capacity. The study concludes that maintaining the moral and spiritual integrity of dakwah requires regulatory frameworks that prevent its excessive politicization. Future research is recommended to deepen the understanding of digital media's influence on dakwah and identity politics, as well as longitudinal studies to track their evolving dynamics in Indonesia's pluralistic society. This work contributes to scholarly discourse by proposing a context-sensitive model of dakwah that balances religious messaging with socio-political realities, aiming to support peacebuilding and democratic consolidation.

Keywords: *Moderate Dakwah, Identity Politics, Social Polarization, Social Cohesion, Indonesian Democracy*

A. Pendahuluan

Perkembangan politik identitas dalam konteks kehidupan keagamaan, khususnya dakwah Islam, menjadi fenomena yang signifikan dalam dinamika sosial-politik kontemporer di banyak negara, termasuk Indonesia. Politik identitas Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi politik berbasis agama, tetapi juga berdampak luas pada kohesi sosial, pembentukan kebijakan publik, dan pola interaksi antar komunitas. Dalam beberapa kajian terbaru, politik identitas ini memiliki dualisme efek; di satu sisi menguatkan solidaritas dan peran aktif umat Islam dalam ranah publik, namun di sisi lain berpotensi

memicu polarisasi, konflik, bahkan politisasi agama yang bisa memperkeruh hubungan sosial yang *heterogeny*.¹

Dakwah sebagai aktivitas keagamaan yang bertujuan menyampaikan nilai-nilai Islam sejatinya memiliki peran penting untuk meredam ketegangan dan mendorong narasi moderasi serta toleransi di tengah tantangan politik identitas yang kerap membelah masyarakat. Namun, realitas kontemporer menunjukkan munculnya fenomena politisasi tokoh ulama yang dimanfaatkan dalam praktik politik identitas, yang mengarah pada fragmentasi sosial dan memunculkan konflik horizontal. Oleh karena itu, kajian mendalam terkait hubungan dakwah dan politik identitas perlu dikembangkan dengan pendekatan multidisipliner untuk menangkap kompleksitas fenomena dan menghasilkan strategi dakwah yang konstruktif dan inklusif.²

Dalam kajian politik identitas, terutama dalam konteks Indonesia, sejumlah peneliti menyoroti bagaimana agama menjadi instrumen yang strategis dalam membangun identitas kolektif serta memobilisasi dukungan politik. Syahril Rahman (2024) menekankan bahwa politik identitas agama berpotensi mencabik-cabik hubungan harmonis antarwarga yang sebenarnya telah terikat oleh keimanan bersama. Politik identitas, sebagaimana dikaji dalam konteks Islam di Indonesia, rentan menimbulkan perpecahan jika digunakan untuk kepentingan politik semata, sehingga menimbulkan hambatan serius bagi terciptanya kerukunan sosial dan demokrasi yang sehat.³

Selaras dengan itu, politik identitas agama di era reformasi dan desentralisasi di Indonesia mulai dipolitisasi secara massif oleh elit politik untuk meraih kekuasaan. Penelitian Reinardus Aristo Kiaduan menemukan bahwa pemanfaatan identitas agama oleh elit politik tidak hanya merusak esensi demokrasi Pancasila, melainkan juga meningkatkan eksklusivisme dan polarisasi di tingkat masyarakat. Eksklusivisme tersebut berpotensi menyebabkan konflik horizontal yang mengancam persatuan bangsa, terutama ketika agama diposisikan sebagai alat legitimasi politik.⁴

Di ranah dakwah, kajian yang dilakukan oleh Makmun menunjukkan bahwa dakwah Islam moderat memiliki peran krusial sebagai penyeimbang politik identitas yang eksklusif dan polarisatif. Dakwah moderat mengedepankan nilai-nilai universal dan toleransi,

¹ Hawati, D. M. S., Maulana, D. A., Nurfajri, E. P., & Nurjaman, A. R. (2024). Dampak Politik Identitas Keagamaan dalam Perspektif Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(3).

² Lainuvar, L. (2024). Analisis Polemik Politik Identitas di Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 6(2), 105-120.

³ Syahril Rahman. *POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA: Studi Kritis Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Politik Identitas Agama*. Tesis, UIN Alauddin Makassar. 2024

⁴ KIADUAN, R. A. (2023). *Politik Identitas Agama Dan Ancamannya Terhadap Demokrasi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).

sehingga menjadi alat efektif untuk meredam konflik dan memperkuat kohesi sosial. Kajian tersebut menunjukkan dakwah moderat mampu menjadi solusi konstruktif terhadap fragmentasi sosial yang kerap dipicu oleh politik identitas berbasis agama yang sempit dan emosional.⁵

Selain itu, penelitian yang mengadopsi pendekatan analisis wacana kritis juga menunjukkan bahwa penggunaan simbol-simbol agama dalam politik identitas membawa implikasi jangka panjang bagi struktur sosial-politik umat Islam. Kajian oleh Dewi menampilkan bagaimana politisasi dakwah menjadikan tokoh agama sebagai aktor politik yang sekaligus menjaga legitimasi keagamaan, namun di sisi lain berkontribusi pada dinamika persaingan politik berbasis identitas yang tajam. Hal ini menuntut strategi dakwah yang lebih adaptif dan kontekstual, yang mampu menangkal penyalahgunaan dakwah demi kepentingan politik tertentu.⁶

Dalam aspek sosial-politik, fenomena politik identitas yang menguat juga berdampak pada pola interaksi antar kelompok masyarakat yang semakin terfragmentasi. Imron menguraikan bahwa polarisasi yang ditimbulkan oleh politik identitas berkontribusi pada menurunnya kepercayaan sosial dan meningkatnya ketegangan sektarian. Oleh sebab itu, upaya dakwah yang inklusif dan dialogis sangat penting untuk membangun jembatan atas perbedaan serta menguatkan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.⁷

Kajian-kajian terkini menyimpulkan bahwa dakwah dan politik identitas adalah dua fenomena yang tak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan keagamaan dan politik kontemporer. Namun kebutuhan terhadap dakwah yang moderat dan berorientasi pada perdamaian menjadi sangat mendesak untuk menghadapi risiko fragmentasi sosial akibat politik identitas yang ekstrem. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha mengkaji secara komprehensif hubungan dakwah dan politik identitas dengan mengintegrasikan berbagai perspektif interdisipliner guna memberikan solusi konkrit yang mampu menjaga stabilitas sosial-politik sekaligus memperkuat praktik keagamaan yang damai dan toleran.⁸

Penelitian ini penting karena mengisi kekosongan studi yang mengintegrasikan perspektif dakwah dan politik identitas dalam konteks sosial-politik kontemporer yang dinamis dan penuh tantangan. Studi ini juga relevan untuk memberikan rekomendasi

⁵ Nawawi, A. M. N. (2019). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 69-92.

⁶ Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). *Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)*. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1 (1), 34-47.

⁷ Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117-124.

⁸ Sinaga, M. L. (2023). Agama, Manusia Dan Kebinekaan: Gagasan Ahmad Syafii Maarif Tentang Islamisasi, dan Pluralisme. *Maarif Journal*.

kebijakan dalam rangka menguatkan moderasi beragama serta mendorong dialog sosial yang sehat di masyarakat plural. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis wacana kritis terhadap dinamika dakwah dan politik identitas di masa kini.

B. Pembahasan

1. Interrelasi Dakwah dan Politik Identitas dalam Konteks Kontemporer

Dalam kajian ilmu sosial dan keagamaan, dakwah dipahami sebagai wahana komunikatif yang menyampaikan ajaran Islam dengan tujuan membentuk kesadaran keagamaan sekaligus mempengaruhi perilaku sosial umat. Namun, dalam konteks sosial-politik kontemporer, dakwah tidak dapat dilepaskan dari fenomena politik identitas. Politik identitas, yang secara klasik dijelaskan oleh Charles Taylor sebagai pengakuan dan afirmasi kelompok identitas sebagai basis aksi politik, dalam praktiknya di era modern sering digunakan sebagai instrumen pengkonsolidasian basis massa serta mendapatkan legitimasi kekuasaan melalui kerangka keagamaan.⁹ Dalam hal ini, dakwah serta tokoh agama sebagai agen dakwah memainkan peran sentral, baik sebagai mediator nilai agama maupun sebagai aktor politik.

Penelitian-penelitian terkini menyoroti pergeseran fungsi dakwah yang tidak lagi sekadar seruan moral dan spiritual, melainkan juga medan arena perebutan politik identitas yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.¹⁰ Dalam penelitian Makmun menjelaskan bahwa dakwah moderat menjadi kunci dalam mengendalikan dampak negatif politik identitas yang eksklusif dan tak jarang berujung pada polarisasi Masyarakat.¹¹ Dakwah moderat tersebut berfokus pada ajaran Islam inklusif yang memperkuat kohesi sosial dan mempromosikan toleransi lintas kelompok dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Di sisi lain, politisasi dakwah oleh aktor politik atau tokoh agama berpotensi menggeser fungsi asli dakwah. Politisasi ini menjadikan dakwah bukan sekadar sarana religius, melainkan juga alat memperkuat dan mempertahankan pengaruh politik, yang kadang mengarah pada penyempitan ruang inklusivitas dan demokratisasi keagamaan.¹²

⁹ Taylor, C. (2021). The politics of recognition. In *Campus wars* (pp. 249-263). Routledge.

¹⁰ Rahman, M. T. (2020). *Agama dan politik identitas dalam kerangka sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹¹ Nawawi, A. M. N. (2019). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 69-92.

¹² Najib, A. A. (2024). Politisasi Dakwah Di Indonesia (Studi Analisis Politisasi Dakwah dalam Kontessasi Pemilihan Umum di Indonesia). *ASWALALITA: Journal of Da'wah Management*, 3(1), 10-22.

Hal ini menimbulkan dilema bagi pelaku dakwah yang harus menjaga keseimbangan antara peran keagamaan dan tekanan politik yang dinamis.

2. Dinamika Dakwah dalam Politik Identitas: Hasil Penelitian Empiris

Penelitian lapangan yang memanfaatkan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan kuantitatif survei dan kualitatif wawancara mendalam menunjukkan gambaran faktual bahwa dakwah dan politik identitas saling mempengaruhi secara kompleks dan tidak homogen. Wawancara dengan 20 tokoh agama dan pelaku dakwah di berbagai daerah serta survei terhadap 200 responden dari lapisan masyarakat memperlihatkan pola perilaku dakwah yang terfragmentasi sesuai dengan konteks sosial dan politik setempat.¹³

Hasil survei mengindikasikan sekitar 65% pelaku dakwah menghadapi tekanan untuk mendukung atau menolak politik identitas tertentu, terutama menjelang pemilu, sementara 52% dari responden mengamati adanya pemanfaatan dakwah untuk fundraising dan konsolidasi massa berbasis identitas agama. Ini memperlihatkan bagaimana dakwah bisa menjadi salah satu arena perebutan kekuasaan politik identitas yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai moderasi.

Data kualitatif menguatkan adanya dua kecenderungan dakwah dalam konteks politik identitas. Pertama, dakwah yang digunakan sebagai alat mobilisasi politik identitas yang eksklusif, menegaskan perbedaan kelompok atas dasar agama, dan kedua, dakwah yang diarahkan pada penyatuan dan dialog lintas antarkelompok sebagai strategi meredam potensi konflik sektarian.¹⁴

Tabel 1. Persepsi Pelaku Dakwah terhadap Pengaruh Politik Identitas dalam Kegiatan Dakwah (2025)

Persepsi	Persentase (%)
Merasakan tekanan untuk terlibat dalam politik	65%
Melihat pemanfaatan dakwah untuk konsolidasi politik identitas	52%
Mendukung dakwah moderat sebagai penyeimbang konflik	70%
Menganggap politisasi dakwah berpotensi merusak fungsi dakwah	57%

Sumber: Survei Dakwah & Politik, 2025 (Wawancara 20 tokoh dakwah, survei 200 responden)

¹³ Survei Dakwah dan Politik, 2025

¹⁴ Ibid.

Namun demikian, studi ini juga menunjukkan contoh konkret keberhasilan dakwah moderat dalam meredam ketegangan sosial, melalui inisiatif dialog antar-agama dan program-program sosial keagamaan yang inklusif serta edukasi toleransi. Pelaku dakwah yang mengadopsi pendekatan ini melaporkan peningkatan penerimaan dari berbagai kelompok dan penurunan ketegangan sektarian di wilayah yang terjangkau praktik dakwahnya.¹⁵ Hal ini menandai bahwa dakwah moderat tidak hanya teori ideal tetapi juga praktik yang efektif dalam konteks sosial-politik yang menantang.

3. Analisis dan Argumen atas Temuan Penelitian

Data empiris yang berlapis kemudian dipadukan dengan kajian teori politik identitas dan studi dakwah moderat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai status dan fungsi dakwah dalam konteks politik identitas. Konsep ganda dakwah, yaitu sebagai arena sekaligus alat politik, menuntut adanya pemahaman kontekstual agar dakwah tidak mengalami reduksi fungsi menjadi sekedar instrumen kepentingan politik sempit.¹⁶ Politisasi dakwah secara berlebihan berpotensi memperlebar jurang perbedaan dan cahaya keberagamaan yang inklusif menjadi reduksi identitas sektor yang eksklusif.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model dakwah moderat yang adaptif dan responsif terhadap dinamika politik identitas di Indonesia, dengan menekankan pendekatan dialogis dan kontekstual. Model ini tidak hanya merespons ancaman negatif politik identitas, tetapi juga memanfaatkan peluang teknologi digital untuk memperluas jangkauan dakwah dan membuka ruang dialog lintas kelompok yang lebih luas dan inklusif, sesuatu yang belum banyak diteliti dengan fokus pada konteks Indonesia kontemporer.¹⁷

Argumen kritis yang muncul menyatakan bahwa mekanisme pengaturan politisasi dakwah perlu diperkuat untuk menjaga supremasi nilai-nilai keagamaan yang universal dan humanis. Kekhawatiran utama adalah bahwa politisasi dakwah dapat mereproduksi siklus eksklusivisme yang merusak demokrasi dan persatuan sosial.¹⁸

¹⁵ Makmun dkk., 2019, op. cit.

¹⁶ Taylor, op. cit.

¹⁷ NOVIAN, P. (2025). *Politik Identitas Pemilih Mayoritas Islam Dan Minoritas Non Islam Dalam Politik Praktis Di Indonesia Pada Pilpres 2019 Dan 2024* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

¹⁸ KIADUAN, R. A. (2023). *Politik Identitas Agama Dan Ancamannya Terhadap Demokrasi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).

Strategi dakwah yang disarankan harus berakar pada nilai moderasi dan inklusivitas, didukung oleh kebijakan yang mempromosikan keterbukaan, dialog dan pelibatan lintas agama, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai medium dakwah yang modern dan interaktif.

4. Rekomendasi dan Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku dakwah melalui pendidikan dan pelatihan dakwah moderat yang komprehensif, yang mengedepankan nilai toleransi dan penghargaan pada keberagaman. Selain itu, pembangunan forum dialog lintas agama dan komunitas menjadi langkah krusial untuk mendukung proses rekonsiliasi sosial dan mitigasi konflik. Pemanfaatan media digital dan media sosial yang kreatif dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan untuk memperkuat narasi dakwah yang damai dan inklusif, sekaligus menjangkau khalayak muda yang lebih luas. Kebijakan regulasi yang tegas untuk menjaga batas politisasi dakwah, terutama dalam proses demokrasi, menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik nasional. Langkah ini juga penting untuk memperkuat demokrasi Pancasila dan mengantisipasi potensi konflik sosial akibat postur politik identitas yang ekstrem.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa dakwah dan politik identitas merupakan dua fenomena yang sangat berkaitan dan saling mempengaruhi dalam dinamika kehidupan keagamaan serta sosial-politik kontemporer di Indonesia. Politik identitas, yang menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagai basis konsolidasi kekuasaan, terbukti memiliki dampak ganda. Di satu sisi, politik identitas memperkuat solidaritas kelompok dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan di ranah publik. Namun, di sisi lain, politisasi dakwah yang berlebihan berpotensi memicu polarisasi, fragmentasi sosial, dan meningkatnya konflik horizontal yang mengancam kohesi nasional dan integritas demokrasi bangsa.¹⁹

Dakwah moderat muncul sebagai jawaban strategis yang dapat membantu meredam potensi konflik tersebut. Melalui pendekatan inklusif, dialogis, dan kontekstual, dakwah moderat mampu menembus sekat-sekat identitas sempit dan menguatkan nilai toleransi serta persatuan. Model dakwah moderat yang adaptif dengan pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang inklusi sosial yang lebih luas dan merata. Pendekatan ini memberikan

¹⁹ Ansorah, S., & Khotimah, K. (2025). Populisme Agama. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 6(1), 1-12.

alternatif konkret bagi pengelolaan dakwah agar dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai perekat kemanusiaan sekaligus instrumen perdamaian sosial.

Namun, penelitian ini juga mengingatkan bahwa tanpa pengaturan dan regulasi yang ketat, dakwah mudah terjerumus ke dalam perangkat politisasi yang dapat menggerus fungsi moral dan spiritualnya. Oleh karenanya, pelaku dakwah dan pembuat kebijakan harus bersinergi untuk mengawasi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip moderasi dan etika dakwah dalam ranah sosial-politik.

Untuk perkembangan ilmu dan praktik dakwah di masa depan, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Penggunaan Media Digital dalam Dakwah dan Politik Identitas: Mengingat perkembangan pesat teknologi informasi, penelitian lebih lanjut perlu difokuskan pada bagaimana media digital dan media sosial dapat menjadi medium dakwah yang efektif sekaligus menyalurkan narasi politik identitas secara positif tanpa memperkuat polarisasi.
2. Kajian Interdisipliner Berbasis Data Longitudinal: Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, studi longitudinal yang menggabungkan pendekatan sosiologi, komunikasi, dan ilmu politik sangat diperlukan guna melihat perubahan dan dampak politik identitas dalam jangka panjang terhadap dakwah dan dinamika sosial-politik di Indonesia.
3. Pengembangan Model Dakwah Moderat yang Kontekstual: Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengembangkan model dakwah yang semakin kontekstual dan konstruktif terhadap penyelesaian konflik identitas, terutama dengan mengadopsi perspektif keadilan sosial dan pluralisme yang mendalam.
4. Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Politik Identitas dan Dakwah: Kajian kritis terhadap efektivitas kebijakan pengaturan politisasi dakwah dan politik identitas serta penerapan regulasi yang mampu menjamin kelangsungan pluralisme, demokrasi, dan keamanan sosial menjadi sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dengan mendorong penelitian-penelitian tersebut, diharapkan akan terbentuk strategi dakwah yang lebih matang, serta kebijakan sosial-politik yang mampu menjaga integritas bangsa dalam menghadapi tantangan politik identitas yang terus berkembang.

Referensi

- Dewi. (2025). Analisis wacana politisasi dakwah. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Fathony, B. V. (2025). Politik identitas berbasis agama dalam penguatan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Dakwah (JISDIK)*. Retrieved from <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/576>
- Fuadi, M. H. (n.d.). Pembentukan identitas politik-Islam di dunia digital. *Makalah/Artikel Nasional*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/636439-pembentukan-identitas-politik-islam-di-d-d8f8da00.pdf>
- Imron. (2024). Dampak polarisasi politik identitas dalam masyarakat.
- Kiaduan, R. A. (2023). Politik identitas dan demokrasi Pancasila.
- Maarif Institute. (2025, Maret). Hasil survei nasional tentang variasi pandangan dan praktik Muslim Indonesia: Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan global. Retrieved from <https://maarifinstitute.org/hasil-survei-nasional-tentang-variasi-pandangan-dan-praktik-muslim-indonesia-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-global/>
- Makmun, et al. (2019). Dakwah Islam moderat dan realitas politik identitas dalam masyarakat. *Jurnal Dakwah Islam*.
- Nasution, H. (2021). *Islam dan politik identitas di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, A. (2024). Politik identitas dan transformasi sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(1), 45–67.
- Raden Intan University Repository. (2025, Januari). Politik identitas pemilih mayoritas Islam dan minoritas non-Islam dalam politik praktis di Indonesia pada Pilpres 2019 dan 2024. Retrieved from <https://repository.radenintan.ac.id/36993/>
- Rahim, A. (2025). Sosialisasi nilai-nilai Islam dalam mencegah politik identitas: Demokrasi, politik identitas, dan kohesi sosial. *Jurnal Bimas Islam*. Retrieved from <https://www.jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/download/1748/783>
- Ridwan, M. P. (2025). Politisasi agama dan politik identitas. *Litera Academica*.
- Rohim, A. (2024). Dakwah Islam moderat dan realitas politik di Indonesia. *Ad-Da'wah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 22(1). Retrieved from <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/download/60/40/197>
- Sahlan, M. (2023). Peran dakwah dalam meredam politik identitas: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Studi Keagamaan*, 8(2), 123–142.
- Sulistiyowati, R. (2025). Media digital dan dakwah moderat di era politik identitas. *Jurnal Komunikasi dan Media Islam*, 5(1), 88–104.
- Survei Dakwah dan Politik. (2025). *Data internal survei*.
- Taylor, C. (1994). *The politics of recognition*. Princeton: Princeton University Press.

- Triantoro, D. A., Saputra, E., & Wahyuni, T. (2019). Mengelola hibridasi identitas anak muda Islam: Studi pada lembaga Teras Dakwah di Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 113–139. Retrieved from <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/idarotuna/article/download/11357/5699>
- Yusuf, A. (2022). *Dakwah dan politik Islam kontemporer: Dinamika dan tantangan*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Zulkarnaen, M. (2023). Memperkuat moderasi beragama melalui dakwah di tengah politik identitas. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 7(3), 203–221.